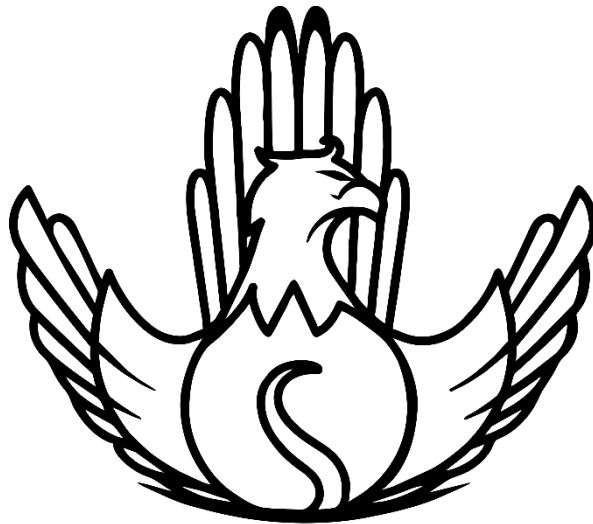


**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BELANJA MODAL DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020-2024**



**STIE
Surakarta**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:
Kintan Indra Jati
22210062

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020 - 2024

Oleh :
Kintan Indra Jati
22210062

Disetujui dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 12 November 2025
Dosen Pembimbing



Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A
NUPTK. 6555772673230230

PENGESAHAN PENGUJI

Tugas Akhir

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020 - 2024

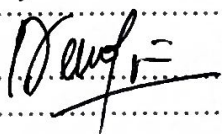
Oleh :
Kintan Indra Jati
22210062

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Tugas Akhir
Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 30 Desember 2025
Dewan Penguji

Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A
Ketua

Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si
Anggota

: 
: 

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta


Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NUPTK. 5438767668131040
Surakarta

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak.
NUPTK. 2856776677230130

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kintan Indra Jati

NIM : 22210062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Tugas Akhir ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Tugas Akhir ini.

Sukoharjo, 12 November 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Kintan Indra Jati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”
-Taylor Swift

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta. Bapak dan Ibu, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Doa yang tidak pernah putus, dukungan tanpa syarat, serta semangat yang selalu Bapak dan Ibu berikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam melalui setiap proses pembelajaran selama kuliah hingga penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi persembahan kecil sebagai bentuk rasa hormat, cinta dan kebanggaan penulis kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan umur panjang kepada Bapak dan Ibu untuk melihat kami para anak-anaknya menggapai cita-cita. Amiin
2. Saudara kandung saya, Bisma Adyaksa Utama dan Nandya Puspajati, yang turut memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Sahabatku tercinta, Cahyaningtyas Puspitasari, terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan, semangat dan doa yang senantiasa dipanjatkan. Terimakasih atas kebersamaan dan kesediaan untuk selalu menemani, memberikan dorongan, serta meyakinkan penulis bahwa setiap tantangan dalam penyusunan skripsi ini dapat dilalui.
4. Untuk diriku sendiri, terimakasih karena sudah berusaha menyelesaikan semua rangkaian pendidikan ini, terimakasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Meskipun bukan dikampus impianmu dulu, tetapi penulis berharap semoga langkahmu hari ini bisa mengantarkanmu kepada pintu kesuksesan dan dapat membanggakan kedua orang tua. Semoga next time kamu bisa menulis lembar persembahan pada thesis di kampus negeri impianmu. Amiin
5. Kepada teman-teman seperjuangan, April, Ayu, Erina dan Rahma, penulis menyampaikan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama awal perkuliahan hingga akhir. Terimakasih atas dukungan, kebersamaan, kerja sama serta motivasi yang menguatkan dalam setiap proses.

6. Terimakasih kepada dosen pembimbing, Ibu Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A. yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat ilmu, motivasi dan arahan Ibu, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Akuntansi. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak. selaku ketua program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A. selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah memberikan izin, arahan serta ilmu dalam pelaksanaan penelitian guna menyelesaikan skripsi.
6. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Yang Relevan.....	12
1. Teori Keagenan	12
2. Belanja Modal	14
3. Pendapatan Asli Daerah.....	15
4. Dana Alokasi Umum	16
5. Dana Alokasi Khusus.....	16
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Objek Penelitian	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35

D. Sumber Data.....	36
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Definisi Operasional Variabel.....	37
H. Teknik Analisis Data	40
1. Uji Statistik Deskriptif	40
2. Uji Asumsi Klasik	40
3. Analisis Regresi Linear Berganda	43
4. Koefisien Determinasi (R^2)	43
5. Pengujian Hipotesis	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Penelitian.....	47
B. Analisis Data	48
1. Analisis Statistik Deskriptif	48
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Analisis Regresi Linear Berganda	54
4. Koefisien Determinasi (R^2)	56
5. Pengujian Hipotesis	56
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan.....	64
C. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Jumlah Sampel Penelitian	37
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	38
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear.....	54
Tabel 4. 7 Hasil Koefisien Determinasi	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	57
Tabel 4. 9 Hasil Uji T	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.....	3
Gambar 1. 2 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sukoharjo	4
Gambar 1. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo	5
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 9. Dokumentasi Objek Penelitian

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Kintan Indra Jati

22210062

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yg mempengaruhi belanja modal di kabupaten sukoharjo tahun 2020-2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo dan sampel penelitian terdiri dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2024, dengan jumlah sampel sebanyak 60 data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian secara simultan, meskipun pada penelitian ini tidak menyertakan hipotesis simultan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, BPKPAD Sukoharjo

Factors Affecting Capital Expenditure in Sukoharjo Regency in 2020-2024

Kintan Indra Jati

22210062

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the factors that affect capital expenditure in Sukoharjo Regency in 2020-2024. This study is a quantitative research using secondary data. The data collection technique in this study is using documentation and interviews. The population in this study is the entire Sukoharjo Regency APBD realization report and the research sample consists of the 2020-2024 APBD Realization Report, with a sample of 60 data. The results of this study show that the General Allocation Fund (X2) has a significant effect with a negative direction on Capital Expenditure while Regional Original Revenue (X1) and Special Allocation Fund (X3) do not have a significant effect on Capital Expenditure. In this study, simultaneous testing was also carried out, although this study did not include a simultaneous hypothesis.

Keywords: Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Capital Expenditure, BPKPAD Sukoharjo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran pemerintah daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diberi kebebasan dalam merancang kebijakan dan menjalankan program pembangunan, serta menyusun anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing serta diberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sebagai perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur penerimaan dan pengelolaan keuangan, baik dari sisi administrasi maupun pemanfaatannya, yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Jayanti, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang kemudian ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam APBD, selain memuat unsur pendapatan, juga terdapat alokasi belanja daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Menurut Mahmudi dalam Pramudya *et al.*, (2021), belanja operasi merupakan pengeluaran rutin yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang manfaatnya bersifat jangka pendek, yakni kurang dari satu tahun.

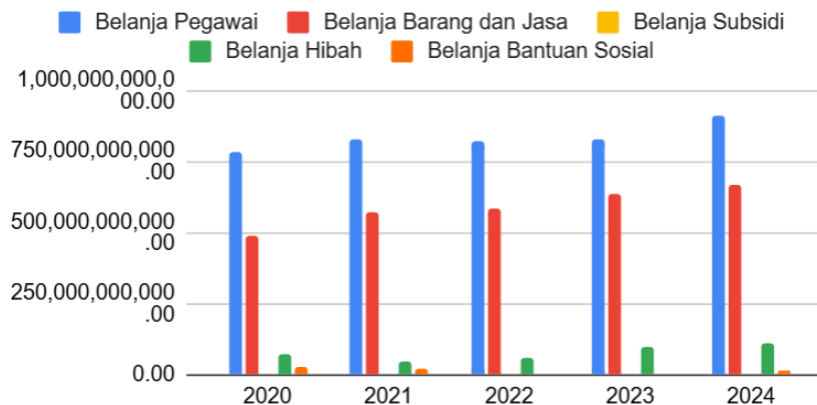
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset-aset ini dapat berupa tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Modal merupakan instrumen kebijakan daerah untuk meningkatkan layanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Belanja modal dialokasikan dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana publik guna mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat (Farhan *et al.*, 2023). Meskipun otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan ekonomi daerah melalui belanja modal, namun pada kenyataannya alokasi serta efektivitas belanja modal masih relatif rendah dibandingkan belanja operasi.



Gambar 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Sumber : Portal Resmi Kabupaten Sukoharjo

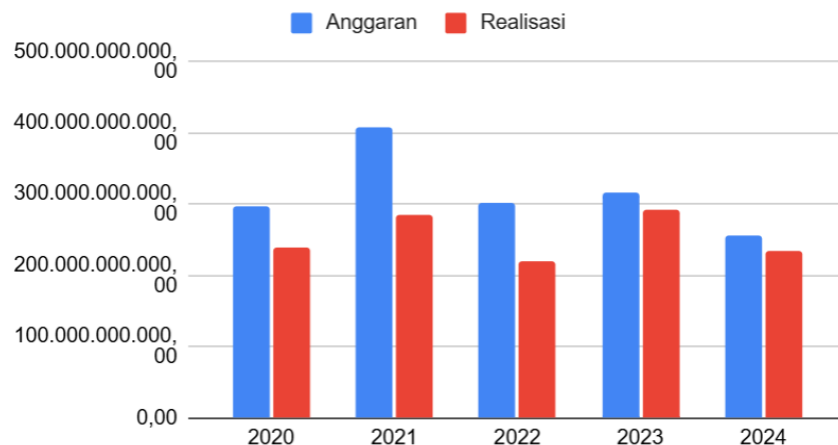
Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa belanja Kabupaten Sukoharjo lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi, sementara alokasi belanja modal relatif rendah dan bahkan realisasinya belum mampu mencapai target. Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih didominasi pengeluaran jangka pendek, padahal belanja modal memiliki peran strategis dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah. Adapun belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.



Gambar 1. 2 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa dalam komponen belanja operasi, belanja pegawai selalu menempati porsi terbesar setiap tahunnya di Kabupaten Sukoharjo. Walaupun belanja barang dan jasa tidak sebesar belanja pegawai, namun proporsinya masih tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa belanja pegawai menyumbang nominal yang cukup tinggi pada belanja daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Sukoharjo masih didominasi oleh belanja yang bersifat rutin dan jangka pendek, sehingga dapat membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja modal yang lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.



Gambar 1. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar realisasi anggaran diatas, belanja modal menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2020-2024, terutama pada tahun 2022 dan 2024 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal jumlah dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat tergolong besar dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2024. Melihat kondisi tersebut, dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo belum menunjukkan hasil yang optimal. Dampak dari kinerja keuangan yang belum optimal ini membuat Kabupaten Sukoharjo kurang mandiri secara fiskal sehingga pembiayaan kebutuhan daerah masih sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat.

Menurut Jayanti (2020), tingkat keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur melalui rasio antara realisasi belanja modal dengan tingkat penyerapan anggarannya. Pemanfaatan belanja modal yang optimal dapat mendorong peningkatan dan perbaikan dalam pengadaan aset tetap yang

dimiliki dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, bukan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berkontribusi besar terhadap pelaksanaan belanja modal dan berperan penting dalam mendukung kemandirian pemerintah daerah, mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. PAD berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat (Hidayat *et al.*, 2024). Menurut Ardhani dalam Wandira *et al.*, (2012), ketika PAD suatu daerah meningkat, kemampuan daerah tersebut untuk membiayai belanja modal juga cenderung meningkat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dalam konteks desentralisasi, DAU diberikan kepada daerah sebagai upaya pemerataan keuangan dan penutupan celah fiskal, sehingga potensi masing-masing daerah dapat ditingkatkan (Harmayanti *et al.*, 2021).

Sebagai salah satu sumber keuangan daerah, dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan pengalokasian DAU ini, diharapkan ketimpangan yang signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal sudah tidak ada lagi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain menerima DAU, Pemerintah Daerah juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diberikan kepada daerah dengan kriteria dan persyaratan tertentu, baik dari segi kemampuan keuangan daerah maupun kebutuhan pembangunan sektoral. Menurut Ardhani dalam Wandira *et al.*, (2012), pemanfaatan DAK ini difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana serta prasarana fisik pelayanan publik yang memiliki umur ekonomis panjang, serta diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui realisasi belanja modal.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kharismadani & Hendarti (2020), bahwa variabel PAD dan variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2020), yaitu variabel PAD dan variabel DAU

memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, variabel DAK tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil penelitian oleh Purba *et al.*, (2021), menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, variabel DAU dan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.

Hasil penelitian oleh Pramudya *et al.*, (2021), menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura. Hasil penelitian oleh Syukri *et al.*, (2022), menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. Hasil penelitian oleh Farhan *et al.*, (2023), menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal, variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal, dan variabel DAK tidak berpengaruh terhadap realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal di suatu pemerintahan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan informasi dan referensi ilmiah mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal di pemerintah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti kajian serupa serta sebagai acuan bagi penelitian mendatang dalam bidang keuangan daerah dan pengelolaan anggaran publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan pengalaman peneliti terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek belanja modal.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penganggaran, khususnya terkait peningkatan efektivitas belanja modal. Temuan

penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar kajian bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan studi terkait belanja modal, pengelolaan keuangan daerah, atau faktor-faktor fiskal lainnya. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi publik dan manajemen keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling, sebagaimana dikutip oleh Salsabella (2023), teori keagenan merupakan konsep dalam bidang ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana agen bertindak sebagai pihak yang menerima delegasi serta diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, sementara prinsipal berperan sebagai pihak yang memberikan wewenang dan kepercayaan tersebut. Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara masyarakat sebagai pihak prinsipal dan pemerintah sebagai agen, yang terjalin melalui suatu kontrak sosial. Masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya publik serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Selain hubungan tersebut, teori keagenan juga menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara.

Pada hubungan keagenan, pemerintah bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat, yang telah mempercayakan wewenang dan tanggung jawab melalui mekanisme seperti

pemilihan umum. Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola anggaran dan aset publik. Namun, perbedaan kepentingan serta ketimpangan informasi antara masyarakat dan pemerintah dapat menimbulkan potensi konflik, terutama jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Demikian pula, pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah daerah melalui transfer dana seperti DAU dan DAK untuk melaksanakan program pembangunan. Namun, dalam praktiknya sering muncul potensi ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen, baik dalam hal pengalokasian maupun penggunaan anggaran. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan prioritas nasional tertentu seperti pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan, sementara pemerintah daerah lebih memprioritaskan pengeluaran rutin atau program yang bersifat jangka pendek, seperti peningkatan belanja pegawai atau proyek yang dianggap lebih memberikan keuntungan politik daerah.

Ketidaksesuaian ini juga dapat menyebabkan asimetri informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait realisasi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo dalam Febriana (2015), akuntabilitas pada sektor publik berarti kewajiban pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan

seluruh aktivitas dan kegiatannya dengan cara menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan menuntut pertanggungjawaban atas amanah yang telah mereka berikan.

2. Belanja Modal

Belanja modal menurut Kemenkeu (2025) adalah bagian dari pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bersifat investasi karena bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tidak berwujud. Menurut pernyataan Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purba & Gulo (2022), untuk meningkatkan belanja modal, khususnya dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan, memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi karena semakin besar alokasi belanja modal, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas perekonomian yang bisa dicapai daerah. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal diharapkan mampu menghasilkan aset yang dapat digunakan secara langsung dalam

kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang pemungutannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. PAD diukur dari nilai total penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Tingkat PAD setiap daerah berbeda tergantung pada urgensi dan potensi ekonomi serta kekayaan alamnya. Daerah dengan sumber daya melimpah umumnya memiliki PAD lebih tinggi dibandingkan daerah yang kurang potensial, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah (Farhan *et al.*, 2023). Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan realisasi belanja modal serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Peningkatan PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah serta memperluas kapasitas pembiayaan belanja modal tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Kartikasari

& Rohman (2019), terdapat hubungan antara PAD dengan belanja modal, namun tidak semua daerah dengan pendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

4. Dana Alokasi Umum

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU diukur berdasarkan jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang tercatat dalam laporan keuangan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, pemerintah menetapkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum minimal adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri *Neto*. Menurut Salsabella (2023), DAU dipergunakan agar terciptanya stabilitas perekonomian, untuk menghindari kesenjangan antar daerah, dan pemerataan keuangan. Namun, DAU dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu dana transfer yang diberikan tanpa persyaratan yang ketat, sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan berpotensi terjadinya pemborosan dana (Kartikasari & Rohman, 2019).

5. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan urusan daerah

sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Menurut pernyataan Juniawan & Suryantini sebagaimana dikutip oleh Siregar (2022), pendanaan ini diprioritaskan bagi daerah tertentu yang memenuhi kriteria khusus sehingga layak mendapatkan alokasi tambahan dana dari pemerintah pusat yang direalisasikan melalui DAK. Pemanfaatan prioritas pada DAK ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Hasil
1.	Kharismadani & Hendarti (2020)	Pengaruh PAD, DAK, dan SILPA Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018	X1 - PAD X2 - DAK X3 - SILPA	Belanja Modal	PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Surakarta, DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Surakarta,

					Sedangkan SILPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Surakarta.
2.	Jayanti (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018	X1 - PAD X2 - DAU X3 - DAK	Belanja Modal	PAD berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Sedangkan DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3.	Abbas <i>et al.</i> , (2020)	Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya	X1 – Pajak Daerah X2 – Retribusi Daerah X3 – DAU X4 - DAK	Belanja Modal	Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Banten, Retribusi Daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

					modal di Provinsi Banten, Sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Banten, DAK juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Banten.
4.	Maulana <i>et al.</i> , (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	X1 – PAD X2 – DAU X3 – SiLPA X4 – Luas Wilayah	Belanja Modal	PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, Luas wilayah juga berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
5.	Purba <i>et</i>	Faktor-Faktor	X1 - PAD	Belanja	PAD

	<i>al.,</i> (2021)	Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun	X2 - DAU X3 - DAK	Modal	berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun, DAU tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun.
6.	Pane <i>et al.,</i> (2021)	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	X1 - PAD X2 - Dana Perimbangan	Belanja Modal	PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, DBH berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, DAK juga memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah

					Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
7.	Pramudya <i>et al.</i> , (2021)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Di Pulau Madura Tahun 2014-2018	X1 - PAD X2 - DAU X3 - DAK	Belanja Modal	DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Pulau Madura, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Pulau Madura, sedangkan DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di Pulau Madura.
8.	Utary (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	X1 - PAD	Belanja Modal	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Sukabumi.

9.	Harmayanti <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	X1 – PAD X2 – Dana Perimbangan	Y – Belanja Modal Z – Kesejahteraan Masyarakat	PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Belanja Modal
----	-----------------------------------	--	-----------------------------------	---	---

					tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal.
10.	Septiani (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Hibah, dan SiLPA Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa	X1 – PAD X2 – DAK X3 – DAU X4 – Hibah X5 - SiLPA	Belanja Modal	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di

		Tengah			Provinsi Jawa Tengah, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, Hibah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan SiLPA juga tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
11.	Maria <i>et al.</i> , (2021)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal	X1 -PAD X2 - Dana Perimbangan X3 - SiLPA X4 - Rasio Ruang Fiskal	Belanja Modal	PAD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh pada alokasi belanja modal. SiLPA berpengaruh pada alokasi belanja modal. Dan Rasio ruang fiskal juga

					berpengaruh pada alokasi belanja modal.
12.	Syukri <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi	X1 - PAD X2 - DAU X3 - DBH	Belanja Modal	DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jambi, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jambi, sedangkan DBH juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
13.	Purba & Gulo (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016-2021	X1 - PAD X2 - DAU	Belanja Modal	PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Nias Barat.
14.	Tiyas & Wuryani (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi	X1 - PAD X2 - DAU X3 - DBH X4 - SILPA	Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di

		Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Jawa Timur			Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur, DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur, sedangkan SILPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur.
15.	Khafif & Romandhon (2022)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	X1 – Rasio Derajat Desentralisasi X2 – Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah X3 – Rasio Tingkat Pembayaran SiLPA X4 – Rasio Kemandirian	Belanja Modal	Rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali, Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali, rasio tingkat pembiayaan

					SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali, Rasio kemandirian memiliki tingkat pengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali.
16.	Siregar (2022)	Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat	X1 - DAU X2 - DAK X3 - PAD X4 - PE	Belanja Modal	DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, sedangkan PE juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.
17.	Farhan <i>et al.</i> , (2023)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi	X1 - PAD X2 - DAU X3 - DAK X4 - DBH X5 - SILPA	Belanja Modal	DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di

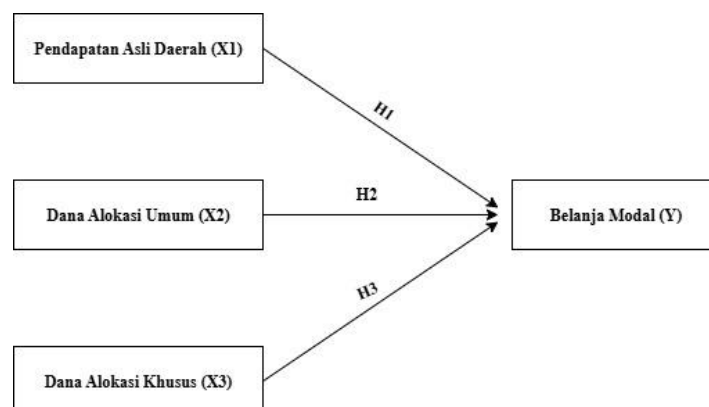
		Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Bangka Belitung, SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Bangka Belitung, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Bangka Belitung, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Bangka Belitung, sedangkan DBH juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Bangka Belitung.
18.	Malau & Sumaizar (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Pematang Siantar	X1 - PAD	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di kota Pematang Siantar.
19.	Salsabell a (2023)	Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah	X1 - Pertumbuhan Ekonomi X2 - PAD X3 - DAU	Belanja Modal	PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di

		Daerah Provinsi Jawa Tengah	X4 - DAK X5 - DBH X6 - SILPA		Provinsi Jawa Tengah, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, DBH juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan SILPA juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
20.	(Hidayat <i>et al.</i> ,	Pengaruh Dana Alokasi	X1 - DAU X2 - PAD	Belanja Modal	PAD memiliki pengaruh positif

	(2024)	Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat	X3 - Kinerja Keuangan		terhadap belanja modal di Jawa Barat, DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal di Jawa Barat, sedangkan Kinerja Keuangan berpengaruh Negatif terhadap belanja modal di Jawa Barat.
--	--------	--	-----------------------	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur konseptual yang menyajikan penjelasan logis antara teori yang digunakan, variabel penelitian dan rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Berdasarkan landasan teori dari penelitian terdahulu, maka dibentuk kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi yang ada di daerah itu sendiri dan dipungut oleh pemerintah daerah melalui kewenangannya sendiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana dari pusat. PAD digunakan untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari (Tiyas & Wuryani, 2022). Hubungan keagenan dalam PAD dapat dilihat dari tanggung jawab pemerintah daerah (agen) dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (prinsipal) dan memajukan perekonomian daerah melalui alokasi belanja modal (Kartikasari & Rohman, 2019). Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk

mempermudah pendistribusian barang, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan sarana ekonomi seperti pasar daerah atau sentra UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal. Menurut Febriana (2015), besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD.

Penelitian yang dilakukan Purba *et al.*, (2021), memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Begitu pula dengan Tiyas & Wuryani (2022), yang mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat *et al.*, (2024), juga memperoleh hasil yang sama yaitu PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat (Kartikasari & Rohman, 2019). DAU merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat kepada daerah dan tidak ditentukan secara spesifik penggunaannya oleh pemerintah pusat. Hubungan antara keagenan dengan DAU tercermin pada peran pemerintah daerah sebagai agen yang

bertanggung jawab dalam mengelola DAU secara efektif dan akuntabel demi kepentingan masyarakat sebagai pihak prinsipal, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial melalui alokasi belanja modal. Menurut Siregar (2022), pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintah karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukri *et al.*, (2022) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabella (2023), juga memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Begitu pula dengan Jayanti (2020) yang mengungkapkan bahwa hasil DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahunn 2020-2024

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Febriana, 2015). Hubungan antara keagenan dengan DAK dapat dilihat dari peran pemerintah daerah sebagai agen yang bertugas mengelola DAK secara efektif sesuai dengan prioritas nasional untuk kepentingan masyarakat

sebagai pihak prinsipal. DAK yang ditujukan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam alokasi belanja modal. Secara umum, DAK terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Diantara keduanya, DAK Fisik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal. DAK Fisik difokuskan pada pengadaan, pembangunan, serta peningkatan sarana dan prasarana publik, seperti infrastruktur jalan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur strategis lainnya.

Penelitian oleh Kharismadani & Hendarti (2020) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian oleh Pramudya *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Begitu pula dengan Pane *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil seluruh analisis data dan pembahasan pada penelitian ini mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Belanja Modal
3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

B. Keterbatasan

Beberapa data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian (Tahun 2024) masih menunggu proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. sehingga peneliti hanya dapat menggunakan data sementara atau data yang belum final.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada beberapa Kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa

Tengah, sehingga dari hasil penelitian dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan antar daerah.

2. Penelitian berikutnya diharapkan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang atau menambah variabel lain untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mempersiapkan data penelitian secara lebih matang sejak awal, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data dapat berjalan lebih efisien tanpa adanya waktu tunggu yang berlebihan.
4. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran melalui penguatan perencanaan dan pengawasan pada tahap pelaksanaan APBD, serta menggali lebih dalam potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi belanja modal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maulana, I., Islam Batik Surakarta Endang Masitoh, U., & Dewi, R. R. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah* (Vol. 15, Issue 1).
- Dace Purba, Damanik, D., & Purba, E. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 115–126. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.262>
- Febriana, I. S. (2015). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TIMUR Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT*.
- Gugus Wandira, A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2012). 45 Arbie Gugus Wandira/ *Accounting Analysis Journal 2 (1) (2013) AAJ 2 (1) (2013) Accounting Analysis Journal*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Gunawan Siregar, I. (2022). PENGARUH DAU, DAK, PAD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL. In *Dynamic Management Journal ISSN* (Vol. 6, Issue 2). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj>
- Gusti Farhan, M., Kartika Rachma Sari, & Muhammad Husni Mubarak. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2358–2370. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1620>
- Harmayanti, H., Semailla, B., Rahman, Z., & Manulusi, M. R. (2021). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. 4.
- Hidayat, T., Permatasari, M. D., & Aeni, P. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 105–115. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818>
- Jayanti, F. D. (2020). *THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND SPECIFIC ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE IN THE REGENCIES / CITIES IN CENTRAL JAVA FOR THE 2016-2018 PERIOD*. 8(3), 335–341. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Julhadi, M. A., Susilawati, D., Rosa, S., Adriani, P., Ganiem, L. M., Fazilla, S., Aminy, M. H., Nurainiah, N., Syafruddin, S., Setyowidodo, A., Ririen, D., Diwati, F., Julyanti, E., & Ratnaningtyas, E. M. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN*. <http://penerbitzaini.com>
- Kartikasari, M. A., & Rohman, A. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kemenkeu. (2025). *Belanja Modal*.
- Khafif, A., & Romandhon, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, 2(2).
- Kharismadani, D. A., & Hendarti, Y. (2020). *Pengaruh PAD, DAK, DAU, dan SILPA Pada Pemerintah Kota Surakarta*. 2.
- Kresna Pramudya, F., Faisal Abdullah, M., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, F. (2021). *Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal*. 4, 653–660. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>

- Malau, E. I., & Sumaizar. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA PEMATANG SIANTAR*. 9(1). <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Maria, M., Indriasari, D., Nurhasanah, N., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 2021.
- Pane, Y., Martini Simarmata, A., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). *ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, BPK RI (2005).
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, BPK RI (2006).
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BPK RI (2020).
- Purba, I. R., & Gulo, V. T. I. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT PERIODE 2016 - 2021*. 8(2), 231–245.
- Salsabella, N. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL*.
- Septiani, E. Y. (2021). *Septiani - PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI, DLL (STIES)*.
- Sugiyono, S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. www.cvalfabeta.com
- Surya Abbas, D., Eksandy, A., Hidayat, I., Larasati, N., & Studi Akuntansi, P. (2020). *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 6-Nomor 2, Desember 2020, (Hlm 154-168) BELANJA MODAL DI PROVINSI BANTEN BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA*. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi*. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Jawa Timur*.
- Utary, V. S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi*.
- UU Nomor 33 Tahun 2004, BPK RI (2004).
- UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, BPK RI (2004).
- Yanti, V. M. (2023). *PENGARUH PENEMPATAN KERJA BEBAN KERJA DAN MUTASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN (BPPK) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*.